

## Partai Golkar Berharap Gibran Segera Jadi Kader Setelah Jadi Cawapres

JAKARTA (IM) - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily berharap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mau menjadi kader partainya setelah diusung sebagai bakal calon wakil presiden.

Meski begitu, ia menekankan saat ini hal terpenting untuk Golkar adalah membantu kemenangan Gibran yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Sekarang fokus kita adalah bagaimana menang Prabowo-Gibran dulu," kata Ace di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

Meski begitu, Ace menyatakan, Golkar membuka pintu jika putra Sulung Presiden Joko Widodo itu ingin bergabung.

"Ya mudah-mudahan, beliau tergerak untuk masuk Golkar," ujar Ace.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus sebelumnya menyatakan, sampai saat ini Gibran belum berstatus sebagai kader partai beringin

itu. Pasalnya, Gibran juga belum memutuskan untuk mundur dari PDI-P.

"Mengalir saja dulu, ya kan Pak Gibran belum memutuskan. Biarlah kita tunggu keputusan Pak Gibran berubah ke mana," ujar Lodewijk di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Sementara itu, PDI-P juga tak kunjung memberikan sanksi berupa pemecatan pada Gibran. Namun, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun meminta Gibran segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P tanpa perlu banyak mendramatisasi keadaan.

Sebab, Gibran sudah berani mengambil langkah politik yang berseberangan dengan partai banteng.

"Kalau sudah berani pindah ke sana (kubu Prabowo), kembalikan KTA, kok repot saja urusan begitu," katanya. ● **han**

## "Fit and Proper Test" Calon untuk Panglima TNI Digelar 14 November

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, pihaknya masih menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR terkait *fit and proper test* atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon panglima TNI. Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto yang menjadi calon panglima TNI.

"Komisi I menunggu penugasan Bamus DPR. Sampai sekarang belum," ujar Meutya saat diminta konfirmasi, Rabu (1/11).

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono mengatakan, sudah ada rencana mengenai *fit and proper test* calon panglima TNI. Dia menyebut, *fit and proper test* calon Panglima TNI akan digelar pada tanggal 14 November 2023. Namun, untuk kepastiannya, tetap harus menunggu penugasan dari Bamus DPR.

"Rencana per saat ini adalah *fit and proper test* dilaksanakan pada tanggal 14. Akan tetapi kita tunggu Bamus mengeluarkan keputusan penugasan kepada Komisi I," ucap Dave.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bahwa pihaknya sudah menerima surat presiden (surpres) soal pergantian Panglima TNI.

Puan mengatakan, Presiden Jokowi mengusulkan KSAD Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.

"Nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini menjabat sebagai KSAD," ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selanjutnya, DPR RI bakal melanjutkan surpres tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sebagai informasi, Panglima TNI Jenderal Yudo Margono memasuki akan pensiun pada 26 November 2023.

"Karenanya, memang sesuai dengan Undang-Undang TNI, Presiden harus mengusulkan calon pengganti Panglima TNI kepada DPR," kata Puan. ● **mei**

## Hakim MK dan Ketua KPU Digugat ke PN Jakarta Pusat

JAKARTA (IM) - Perhimpunan Pejuang Pembela Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman beserta delapan Hakim MK lainnya. Selain itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari juga digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Gugatan perdata dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan sembilan hakim MK dan Ketua KPU, didaftarkan pada Jumat (27/10) dengan register perkara No. 722/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Pst. Gugatan ini dilakukan setelah MK mengabulkan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo.

"Petitum gugatan adalah menyatakan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tidak dapat dilaksanakan atau *non executable*," kata Ketua Umum Perkomhan, Priyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (1/11).

Priyanto menilai, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ketua MK, Anwar Usman. Pertama, adanya konflik kepentingan dalam me-

mutus perkara sehingga bertentangan dengan Pasal 17 Ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Majelis hakim MK memutuskan bahwa seseorang bisa ikut mencalonkan diri sebagai capres-cawapres walau belum memenuhi usia minimum 40 tahun, asal berpengalaman sebagai pejabat yang terpilih lewat pemilu.

Putusan itu membuat jalan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mulus untuk maju pada Pilpres 2024 pada usia 36 tahun, berbekal status Wali Kota Solo.

Di sisi lain, putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 diketahui oleh adik ipar Joko Widodo, Anwar Usman yang juga paman dari Gibran Rakabuming Raka.

Kedua, dalam mengambil putusan Anwar Usman dinilai mengabaikan pendapat hukum *concurring opinion* dan *dissenting opinion* yang lebih banyak menolak permohonan pemohon perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. "Ketiga, norma yang mengatur hakim tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika melakukan kesalahan sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Hal ini Tidak sesuai dengan asas *equality before the law*," ujarnya. ● **mei**

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



### KRI BIMA SUCI KEMBALI KE TANAH AIR

Pangkoarmada II Laksda TNI Yayan Sofiyon (kiri) berbincang dengan Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) M. Sati Lubis (kanan) usai KRI Bima Suci bersandar di Dermaga Madura, Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/11). Kapal Latih TNI Angkatan Laut yang telah melaksanakan misi diplomasi dan muhibah duta bangsa dalam rangka mendukung Latihan Praktek (Lattek) Pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-70 tahun 2023 selama tujuh bulan ke sejumlah negara tersebut kini telah tiba di tanah air.

## Eks Dirut Bakti Kominfo Tuding Status "JC" Irwan Hermawan Hanya Skenario Selamatkan Diri

Anang menuding Irwan Hermawan buat skenario seolah-olah tak nikmati uang dari proyek BTS 4G. Padahal, ia telah menerima Rp 243 miliar.

JAKARTA (IM) - Mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Anang Achmad Latif, menuding permohonan *justice collaborator* (JC) yang diajukan eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan

Hermawan, hanya skenario untuk menyelamatkan diri sendiri. Anang mengatakan hal itu dalam nota pembelaan atau pleidoi pribadi kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menjeratnya.

Jaksa sebelumnya telah menetapkan Irwan Hermawan menjadi JC atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Salah satu terdakwa mengajukan sebagai JC seolah-olah publik dihadirkan sebuah cerita yang mengandug kebenaran. JC adalah hak dari setiap terdakwa. Namun untuk kasus ini, JC yang dilakukan terdakwa Irwan Hermawan hanyalah sebuah tindakan untuk menyelamatkan diri semata, tidaklah berbasis kebenaran seluruhnya," kata Anang Latif dalam sidang yang digelar di PN

Tipikor Jakarta, Rabu (1/11).

Anang menuding Irwan Hermawan telah membuat skenario seolah-olah tidak menikmati uang dari proyek BTS 4G. Padahal, menurutnya, eks petinggi PT Solitech Media Sinergy telah menerima Rp 243 miliar terkait proyek tersebut.

"Terdakwa Irwan Hermawan telah membuat skenario seolah-olah dirinya hanyalah seorang pengepul dan penyalur semata atas perintah seseorang. Sama sekali tidak mengambil keuntungan sedikitpun padahal jumlah uang yang diterima mencapai Rp 243 miliar," kata Anang Latif.

"Cerita ini terasa manis sekali diikuti. Terdakwa Irwan Hermawan sangat pintar menyusun skenario hingga publik menikmati ceritanya. Tapi sayangnya, cerita ini tidaklah berbasis kebenaran seluruhnya," katanya menambahkan.

Menurut eks Dirut Bakti ini, upaya JC yang dilakukan

Irwan Hermawan merugikan dirinya dan terdakwa eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak.

"Nampak jelas tujuannya adalah menyelamatkan diri dengan merekayasa kebenaran sehingga merugikan saya dan terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak," kata Anang Latif.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung menetapkan Irwan Hermawan menjadi *justice collaborator* dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Jaksa berpandangan Irwan Hermawan telah memberikan keterangan terkait aliran dana korupsi proyek BTS ke sejumlah pihak.

Menurut Jaksa, apa yang dilakukan Irwan Hermawan telah memberikan manfaat signifikan terhadap kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G yang ditangani Kejaksaan Agung. ● **mei**

## Belanja Iklan Anies "Cuma" Rp930 Juta, Terkecil Dibanding Prabowo dan Ganjar

JAKARTA (IM) - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, anggarkan untuk belanja iklan di media sosial (medsos) hanya Rp 930,54 juta. Merujuk data Ad Library dari Meta Platform, jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja iklan Anies selama Agustus 2020 sampai 24 Oktober 2023.

Ada sejumlah akun yang berkontribusi besar terhadap belanja iklan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, di antaranya, Unboxing Anies. Akun yang dibuat pada Januari 2022 tersebut telah menghabiskan Rp 227,5 juta untuk beriklan hingga Oktober 2023.

Kendati nilai belanja iklan kubu Anies terbilang kecil, namun, pengeluaran tiap bulannya tercatat naik. Pengeluaran belanja kubu Anies pada Agustus-September 2023 rata-rata Rp 212,2 juta. Sedangkan pengeluaran pada Oktober 2023 naik lebih dari Rp 100

juta menjadi Rp 345,7 juta. Ini mengindikasikan bahwa deklarasi dan pendaftaran capres-cawapres yang digelar pada Oktober ini mendorong belanja iklan. Berikut perincian nilai rata-rata belanja iklan Anies Baswedan di Facebook dan Instagram dalam tiga bulan terakhir:

4 Agustus-24 September 2023: Unboxing Anies Rp 65,12 juta, Fakta Anies Baswedan Rp 19,29 juta, Aksi Tanggap Anies Rp 60,66 juta, Suara Anies Rp 42,10 juta, Entitas lainnya Rp 25,02 juta. Sehingga keseluruhan jumlahnya Rp 212,19 juta.

25 September-23 Oktober 2023: Unboxing Anies Rp 90,55 juta, Fakta Anies Baswedan Rp 18,42 juta, Aksi Tanggap Anies Rp 61,17 juta, Suara Anies Rp 49,42 juta, Entitas lainnya Rp 126,14 juta. Jadi jumlah keseluruhan total Rp 345,70 juta.

Jumlah sponsor iklan Anies ini tercatat paling sedikit dibanding dua bakal

capres pesaingnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengeluarkan Rp 8,67 miliar untuk belanja iklan di media sosial selama Agustus 2020 sampai 24 Oktober 2023. Belanja iklan kubu Prabowo terkonsentrasi pada dua akun besar yakni Indonesia Adil Makmur dan akun Bakti untuk Rakyat.

Sementara, pada periode yang sama, bakal capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menghabiskan Rp 3,616 miliar untuk belanja iklan. Sedikitnya ada 283 akun yang beriklan soal Ganjar di medsos, di antaranya, Melihat Indonesia, Ganjar Nusantara Indonesia, Ganjar-Fans, dan beberapa entitas lainnya. Dengan demikian, belanja iklan tiga bakal capres di media sosial selama Agustus 2020 sampai 24 Oktober 2023 total jumlahnya mencapai Rp 13,212 miliar. ● **han**

## Ganjar Prihatin Atas Pencopotan Baliho Bergambar Dirinya di Bali

JAKARTA (IM) - Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P, Ganjar Pranowo mengaku prihatin atas pencopotan baliho bergambar dirinya dan bakal calon wakil presiden, Mahfud MD, di Kabupaten Gianyar, Bali. Dia mempertanyakan maksud dan tujuan pencopotan itu.

Menurut Ganjar, jika pemasangan baliho tidak melanggar aturan, sebaiknya tidak ada pencopotan.

"Saya lagi coba bertanya kenapa dicopot begitu ya? Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (1/11).

Pernyataan ini disampaikan Ganjar usai menghadiri Mukernas V, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar, Bali. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku mendapatkan informasi bahwa baliho yang dicopot sudah dipasang kembali.

Ganjar juga telah berdiskusi mengenai hal ini dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Provinsi Bali, Wayan Koster.

"Saya senang karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement, dan kemudian dipasang lagi, ya kita senang," katanya.

Ganjar menekankan pentingnya netralitas dari semua aparat penegak hukum dalam Pilpres 2024. Hal ini akan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan aman, damai, dan adil.

"Yang penting semua ha-

rus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparaturnya semua bisa netral, itu penting," ujar Ganjar.

Selengkapnya diberitakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10) kemarin.

Beberapa baliho bergambar pasangan capres-cawapres, Ganjar - Mahfud MD, diturunkan jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabut atribut partai politik di lokasi acara," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (31/10).

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyangkut pasangan bakal capres dan wapres maupun partai politik tertentu tetapi untuk semua atribut politik. ● **han**

**PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILALIHAN SAHAM**  
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini PT. SUN JAYA NUSANTARA, Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, mengumumkan bahwa pemegang saham PT. SUN JAYA NUSANTARA, bermaksud mengalihkan seluruh saham dalam PT. SUN JAYA NUSANTARA kepada pihak ketiga.  
Pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para kreditor, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini, dapat mengajukan keberatan tertulis sehubungan dengan pengambilalihan saham ini, disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada kami dengan alamat Jalan Marina Raya, Rukan Exclusive Blok B No. 55, Kramat Muara, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.  
Jakarta, 2 November 2023  
PT. SUN JAYA NUSANTARA  
Direksi



### NOTA PEMBELAAN ANANG ACHMAD LATIF

Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 dari BAKTI Kemenkominfo tahun 2020 - 2022 Anang Achmad Latif (kiri) berpelukan dengan kuasa hukumnya usai membacakan nota pembelaan (pleidoi) pada sidang lanjutan kasus tersebut di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/11).